



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

UNAUDITED TAHUN 2025

**JALAN CIKINI RAYA NOMOR 117, RT 10 RW 4, CIKINI, KECAMATAN MENTENG KOTA
JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10330. WWW.PTTUN-JAKARTA.GO.ID**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

Jakarta, 23 Februari 2026

Nomor : 409/SEK.PTTUN /W2-TUN/PL1.2/II/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahun 2025 (*Unaudited*)

Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
c.q. Kepala Biro Perlengkapan di
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2025 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2025 (*Unaudited*) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta,

Muhidin



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang



Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Jakarta, 18 Februari 2026

Sekretaris

Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta

selaku

Kuasa Pengguna Barang

MUHIDIN





DAFTAR ISI

DATA UTAMA

- 1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA**
- 2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025**
- 3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)**
- 4. Laporan Barang Persediaan**
- 5. Laporan Barang Intrakomptabel**
- 6. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- 7. Laporan Barang Gabungan**
- 8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- 9. Laporan Aset Tak Berwujud**
- 10. Laporan Barang Bersejarah**
- 11. Laporan Barang Rusak Berat**
- 12. Laporan Barang Hilang**
- 13. Laporan Barang BPYBDS**
- 14. Laporan Barang Hibah DK/TP**
- 15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel**
- 16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel**
- 17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud**
- 18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)**
- 19. Laporan PNPB (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)**
- 20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara**
- 21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara**
- 22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara**

DATA TAMBAHAN

- 1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaI dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)**
- 2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya**
- 3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)**
- 4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan**
- 5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN**



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan**
2. **Penjelasan BMN: Software**
3. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya**
4. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2025 (UNAUDITED)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*).

Penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Unaudited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*Unaudited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:



1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp 124,557,030,659 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp 151,900,470,291 dan mutasi tambah sebesar Rp 128,708,192,885 dan mutasi kurang sebesar Rp 141,586,163,165
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian; (2) hibah masuk BMN; (3) Transfer Masuk BMN; dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp 128,708,192,885;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) Koreksi Nilai Berkurang dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp 141,586,163,165;
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP (*Unaudited*) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*Unaudited*). Penyusunan LBKP (*Unaudited*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam



mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*Unaudited*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA
USAHA NEGARA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA

Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Periode Unaudited - Tahun Anggaran 2025

Nomor : 411 /SEK.PTTUN/W2-TUN/PL.1.2/II/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Karunia Dwi Putri Paramita,S.Ak

NIP : 19901205 202012 2 004

Jabatan : Operator Aset

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II Nama : Wisnu Purnama Indra,S.E

NIP : 19830113 202521 1 028

Jabatan : Operator Persediaan dan GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Unaudited - Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Unaudited Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	138,791,989,981.00	(14,235,513,010.00)	124,557,030,659.00
A	ASET LANCAR	816,862.00	-	1,370,550.00
1	Persediaan	816,862.00	-	1,370,550.00
B	ASET TETAP	138,707,333,119.00	(14,235,513,010.00)	124,471,820,109.00
1	Tanah	110,302,727,000.00	(14,357,108,000.00)	95,945,619,000.00
2	Peralatan dan Mesin	9,879,146,434.00	1,478,437,720.00	11,357,584,154.00
3	Gedung dan Bangunan	31,673,583,280.00	-	31,673,583,280.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	12,696,576.00	-	12,696,576.00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(13,160,820,171.00)	(1,356,842,730.00)	(14,517,662,901.00)
C	ASET LAINNYA	83,840,000.00	-	83,840,000.00
1	Aset Tidak Berwujud	219,345,000.00	-	219,345,000.00
2	Aset Lain-lain	362,000.00	-	362,000.00
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(135,867,000.00)	-	(135,867,000.00)
II	BMN NON NERACA	(700,000.00)	2,812,500.00	2,112,500.00
1	Ekstrakomptabel	31,955,001.00	700,000.00	32,655,001.00
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(32,655,001.00)	2,112,500.00	(30,542,501.00)
III	TOTAL GABUNGAN (I + II)	138,791,289,981.00	(14,232,700,510.00)	124,559,143,159.00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Unaudited Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset

Karunia Dwi Putri Paramita,S.Ak
NIP 19901205 202012 2 004

Operator Persediaan dan GLP

Wisnu Purnama Indra,S.E
NIP 19830113 202521 1 028

Mengetahui

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Drs. Muhidin,M.H
NIP 19661125 199603 1 001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

Tgl.Data : 23/02/26 12:49 AM
Tgl.Cetak : 23/02/26 9:20 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,360,550
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,000
131111	Tanah	95,945,619,000
132111	Peralatan dan Mesin	11,357,584,154
133111	Gedung dan Bangunan	31,673,583,280
135121	Aset Tetap Lainnya	12,696,576
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,726,326,425)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,791,336,476)
162151	Software	135,505,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	83,840,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	362,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(362,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(135,505,000)
J U M L A H		124,557,030,659

Dki Jakarta, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris

Drs. Muhidin, M.H
196611251996031001



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

Tanggal : 23/02/26 9:20 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	710,462
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	106,400
131111	Tanah	110,302,727,000
132111	Peralatan dan Mesin	9,879,146,434
133111	Gedung dan Bangunan	31,673,583,280
135121	Aset Tetap Lainnya	12,696,576
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,050,817,400)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,110,002,771)
162151	Software	135,505,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	83,840,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	362,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	108,015,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(362,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(135,505,000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(108,015,000)
J U M L A H		138,791,989,981

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 526704 **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA**

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM
Tanggal : 23/02/26 9:22 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	36,000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	910,200
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	320,000
1010302002	Berbagai Kertas	94,350
Jumlah Barang Konsumsi		1,360,550
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	10,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		10,000
TOTAL		1,370,550

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 9:32 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED			
				URAIAN		BERTAMBAH		BERKURANG							
						KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI				
KODE				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
131111	Tanah			2,262	110,302,727,000	1,526	95,945,619,000	2,262	110,302,727,000	1,526	95,945,619,000				
20101	TANAH PERSIL		-	2,262	110,302,727,000	1,526	95,945,619,000	2,262	110,302,727,000	1,526	95,945,619,000				
132111	Peralatan dan Mesin			940	9,879,146,434	10	1,520,510,605	0	42,072,885	950	11,357,584,154				
30103	ALAT BANTU		-	4	1,713,207,820	0	0	0	0	4	1,713,207,820				
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		-	13	1,161,607,820	0	0	0	0	13	1,161,607,820				
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		-	1	2,997,000	0	0	0	0	1	2,997,000				
30401	ALAT PENGOLAHAN		-	1	4,400,000	0	0	0	0	1	4,400,000				
30501	ALAT KANTOR		-	176	715,692,131	2	12,594,550	0	0	178	728,286,681				
30502	ALAT RUMAH TANGGA		-	556	4,614,663,732	7	1,495,916,055	0	42,072,885	563	6,068,506,902				
30601	ALAT STUDIO		-	19	152,825,385	1	12,000,000	0	0	20	164,825,385				
30602	ALAT KOMUNIKASI		-	17	6,294,000	0	0	0	0	17	6,294,000				
30603	PERALATAN PEMANCAR		-	1	13,492,000	0	0	0	0	1	13,492,000				
30701	ALAT KEDOKTERAN		-	1	1,107,000	0	0	0	0	1	1,107,000				
31001	KOMPUTER UNIT		-	114	1,285,772,066	0	0	0	0	114	1,285,772,066				
31002	PERALATAN KOMPUTER		-	35	195,027,480	0	0	0	0	35	195,027,480				
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		-	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000				
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		-	1	10,560,000	0	0	0	0	1	10,560,000				
133111	Gedung dan Bangunan			3	31,673,583,280	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280	3	31,673,583,280				
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		-	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280				
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		-	2	432,220,000	0	0	0	0	2	432,220,000				
135121	Aset Tetap Lainnya			116	12,696,576	0	0	0	0	116	12,696,576				
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		-	111	12,471,576	0	0	0	0	111	12,471,576				
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		-	5	225,000	0	0	0	0	5	225,000				
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan			1	362,000	0	0	0	0	1	362,000				
30501	ALAT KANTOR		-	1	362,000	0	0	0	0	1	362,000				
TOTAL					151,868,515,290		128,707,492,885		141,586,163,165		138,989,845,010				

Dki Jakarta, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris



Drs. Muhidin, M.H

196611251996031001



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 9:33 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG			SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED								
KODE	URAIAN	SAT	KUANITTAS	NILAI	SALDO AWAL			AKUMULASI PENYUSUTAN		TOTAL	NILAI BUKU
					6	7	7	8=6+7			
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8			
132111	Peralatan dan Mesin		174	31,715,001	1	700,000	0	175	0	32,415,001	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	158,000	0	0	0	1	0	158,000	
30501	ALAT KANTOR	-	59	8,741,301	0	0	0	59	0	8,741,301	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	109	20,935,700	0	0	0	109	0	20,935,700	
30601	ALAT STUDIO	-	1	180,000	0	0	0	1	0	180,000	
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	550,000	0	0	0	1	0	550,000	
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	150,000	0	0	0	1	0	150,000	
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	1,000,000	0	0	0	2	0	1,000,000	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	1	700,000	0	1	0	700,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		2	240,000	0	0	0	2	0	240,000	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	2	240,000	0	0	0	2	0	240,000	
TOTAL				31,955,001		700,000		0	0	32,655,001	

Dki Jakarta, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Drs. Muhidin, M.H.
196611251996031001



LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 9:33 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED		
			BERTAMBAH			BERKURANG					
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
131111	Tanah		2,262	110,302,727,000	1,526	95,945,619,000	2,262	110,302,727,000	1,526	95,945,619,000	
20101	TANAH PERSIL	-	2,262	110,302,727,000	1,526	95,945,619,000	2,262	110,302,727,000	1,526	95,945,619,000	
132111	Peralatan dan Mesin		1,114	9,910,861,435	11	1,521,210,605	0	42,072,885	1,125	11,389,999,155	
30103	ALAT BANTU	-	4	1,713,207,820	0	0	0	0	4	1,713,207,820	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	13	1,161,607,820	0	0	0	0	13	1,161,607,820	
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	2,997,000	0	0	0	0	1	2,997,000	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	158,000	0	0	0	0	1	158,000	
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	1	4,400,000	0	0	0	0	1	4,400,000	
30501	ALAT KANTOR	-	235	724,433,432	2	12,594,550	0	0	237	737,027,982	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	665	4,635,599,432	7	1,495,916,055	0	42,072,885	672	6,089,442,602	
30601	ALAT STUDIO	-	20	153,005,385	1	12,000,000	0	0	21	165,005,385	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	17	6,294,000	0	0	0	0	17	6,294,000	
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	13,492,000	0	0	0	0	1	13,492,000	
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	1,657,000	0	0	0	0	2	1,657,000	
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000	
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	1,000,000	0	0	0	0	2	1,000,000	
31001	KOMPUTER UNIT	-	114	1,285,772,066	0	0	0	0	114	1,285,772,066	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	35	195,027,480	1	700,000	0	0	36	195,727,480	
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000	
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	10,560,000	0	0	0	0	1	10,560,000	
133111	Gedung dan Bangunan		3	31,673,583,280	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280	3	31,673,583,280	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	2	432,220,000	0	0	0	0	2	432,220,000	
135121	Aset Tetap Lainnya		116	12,696,576	0	0	0	0	116	12,696,576	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	111	12,471,576	0	0	0	0	111	12,471,576	
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	5	225,000	0	0	0	0	5	225,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	602,000	0	0	0	0	3	602,000	
30501	ALAT KANTOR	-	1	362,000	0	0	0	0	1	362,000	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	2	240,000	0	0	0	0	2	240,000	
TOTAL				151,900,470,291		128,708,192,885		141,586,163,165		139,022,500,011	

Dki Jakarta, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris



Drs. Muhidin, M.H
196611251996031001



12. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Senin, 23 Februari 2026 09:34:52 (Waktu Server)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Kode UAKPB: 00501010052670400000

Laporan Barang

Pilihan Cetak

Level Laporan	SATKER
Jenis Laporan	Laporan Utama
Laporan	Laporan Barang
Sub Laporan	KONSTRUKSI
Rincian Barang	KELOMPOK
Periode Sampai Dengan	2025-13
Tipe File	☒ PDF ☐

Warning
i Laporan tidak ditemukan.
OK

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM
Tanggal : 23/02/26 9:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

UAPB : 005
UAKPB : 526704

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
			BERTAMBAH		BERKURANG		BERTAMBAH		BERKURANG		BERTAMBAH	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
162151	Software		1	135,505,000	0	0	0	0	1	135,505,000		
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	135,505,000	0	0	0	0	1	135,505,000		
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		1	83,840,000	0	0	0	0	1	83,840,000		
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	83,840,000	0	0	0	0	1	83,840,000		
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		5	108,015,000	0	0	5	108,015,000	0	0		
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	5	108,015,000	0	0	5	108,015,000	0	0		
TOTAL				327,360,000		0		108,015,000		219,345,000		

Dki Jakarta, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Drs. Muhidin, M.H
196611251996031001



14. Laporan Barang Bersejarah

Senin, 23 Februari 2026 09:37:58 (Waktu Server)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Kode UAKPB: 005010100526704000K0

Laporan Barang

Pilihan Cetak	
Level Laporan	SATKER
Jenis Laporan	Laporan Utama
Laporan	Laporan Barang
Sub Laporan	BARANG BERSEJARAH
Rincian Barang	KELOMPOK
Periode Sampai Dengan	2025-13
Tipe File	☒ PDF

Warning
i Laporan tidak ditemukan.
OK

DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

NAMA UAKPB : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA
KODE UAKPB : 526704

TANGGAL : 23-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

DKI JAKARTA, 23 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Sekretaris



Drs. Muhidin, M.H
NIP. 196611251996031001

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

TANGGAL : 23-02-2026
 Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
 HALAMAN : 1 dari 1

NAMA UAKPB : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA
 KODE UAKPB : 526704

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG			RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN			
Tidak ada data										
JUMLAH										

DKI JAKARTA, 23 FEBRUARI 2026
 PENANGGUNG JAWAB UAKPB
 Sekretaris


 Drs. Muhidin, M.H
 NIP. 196611251996031001

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**

NAMA UAKPB : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA
KODE UAKPB : 526704

TANGGAL : 23-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

DKI JAKARTA, 23 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Sekretaris



Drs. Muhidin, M.H
NIP. 196611251996031001

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA
KODE UAKPB : 526704

TANGGAL : 23-02-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

DKI JAKARTA, 23 FEBRUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Sekretaris


Drs. Muhidin, M.H.
NIP. 196611251996031001



LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005
UAKPB : 526704

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 9:45 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG			SAT		SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED				
KODE	URAIAN	Kuantitas	Nilai	Saldo Awal		Akumulasi Penyusutan		Total	Nilai Buku
				6	7	8=6+7	9=5-8		
1	2	3	5						
13111	Tanah	1,526	95,945,619,000	0	0	0	0	0	95,945,619,000
20101	TANAH PERSIL	1,526	95,945,619,000	0	0	0	0	0	95,945,619,000
13211	Peralatan dan Mesin	950	11,357,584,154	(8,050,817,400)	(675,509,025)	(8,726,326,425)	(8,726,326,425)		2,631,257,729
30103	ALAT BANTU	4	1,713,207,820	(1,713,207,820)	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	13	1,161,607,820	(1,161,607,820)	0	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	2,997,000	(2,247,750)	(749,250)	(2,997,000)	(2,997,000)	0	0
30501	ALAT KANTOR	1	4,400,000	(4,400,000)	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	178	728,286,681	(715,692,131)	(2,379,455)	(718,071,586)	(718,071,586)	0	10,215,095
30601	ALAT STUDIO	563	6,068,506,902	(2,960,665,903)	(529,601,490)	(3,490,267,393)	(3,490,267,393)	0	2,578,239,509
30602	ALAT KOMUNIKASI	20	164,825,385	(139,870,305)	(13,135,080)	(153,005,385)	(153,005,385)	0	11,820,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	17	6,294,000	(6,294,000)	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	13,492,000	(13,492,000)	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1	1,107,000	(1,107,000)	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	114	1,285,772,066	(1,173,798,316)	(98,857,500)	(1,272,655,816)	(1,272,655,816)	0	13,116,250
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	35	195,027,480	(147,574,355)	(30,636,250)	(178,210,605)	(178,210,605)	0	16,816,875
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	1,500,000	(300,000)	(150,000)	(450,000)	(450,000)	0	1,050,000
13311	Gedung dan Bangunan	3	31,673,583,280	(5,110,002,771)	(681,333,705)	(5,791,336,476)	(5,791,336,476)	0	25,882,246,804
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	31,241,363,280	(4,985,323,924)	(664,709,858)	(5,650,033,782)	(5,650,033,782)	0	25,591,329,498
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	432,220,000	(124,678,847)	(18,623,847)	(141,302,694)	(141,302,694)	0	290,917,306
135121	Aset Tetap Lainnya	116	12,696,576	0	0	0	0	0	12,696,576
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	111	12,471,576	0	0	0	0	0	12,471,576
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	5	225,000	0	0	0	0	0	225,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1	362,000	(362,000)	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	1	362,000	(362,000)	0	0	0	0	0
JUMLAH				(13,161,182,171)	(1,356,842,730)	(14,518,024,901)	(14,518,024,901)		124,471,820,109



Dki Jakarta, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Drs. Muhidin, M.H
196611251996031001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 005
UAKPB : 526704

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM
Tgl Cetak : 23/02/26 9:45 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED				
KODE	URAIAN	KUANITTAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU	
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		175	32,415,001	(29,515,001)	(787,500)	(30,302,501)	2,112,500
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	158,000	(158,000)	0	(158,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	59	8,741,301	(8,741,301)	0	(8,741,301)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	109	20,935,700	(19,745,700)	(340,000)	(20,085,700)	850,000
30601	ALAT STUDIO	-	1	180,000	(180,000)	0	(180,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	550,000	(165,000)	(110,000)	(275,000)	275,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	150,000	(150,000)	0	(150,000)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	1,000,000	(375,000)	(250,000)	(625,000)	375,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	1	700,000	0	(87,500)	(87,500)	612,500
168112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		2	240,000	(240,000)	0	(240,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	2	240,000	(240,000)	0	(240,000)	0
JUMLAH			177	32,655,001	(29,755,001)	(787,500)	(30,542,501)	2,112,500

Dki Jakarta, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Drs. Muhidin, M.H.
196611251996031001



LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

Tgl Data : 23/02/26 12:49 AM
Tanggal : 23/02/26 9:46 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 526704 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED						
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		1	135,505,000	(135,505,000)	0	(135,505,000)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		1	135,505,000	(135,505,000)	0	(135,505,000)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	null	1	83,840,000	0	0	0	83,840,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	83,840,000	0	0	0	83,840,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		0	0	(108,015,000)	108,015,000	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	(108,015,000)	108,015,000	0	0
JUMLAH			2	219,345,000	(243,520,000)	108,015,000	(135,505,000)	83,840,000

Dki Jakarta, 23 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Drs. Muhidin, M.H.
196611251996031901





CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan



Keuangan Pemerintah;

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;



- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa



Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten



antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca,



sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat.



Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa



mempertimbangkan nilai residu.

4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin



dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 86/SEK/KU2.2/1/2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited).**

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp139,022,500,011 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Sebelas rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 151,900,470,291 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Juta empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp 270,294,356,050 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp 128,708,192,885 (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan ratus Delapan Puluh Lima rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp 141,586,163,165 Seratus Empat Puluh Satu Milyar Lma Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan



pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar Rp 138,791,989,981 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 138,791,989,981 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 31,955,001 (*tiga puluh satu juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Satu Rupiah*).

**B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)**

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1,370,550 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh *Rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	710,462	650,088	1,360,550
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	106,400	96,400	10,000

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp 0,00 (*nol rupiah*).

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp95.945.619.000 (Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu *Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 2.262 m² dengan nilai sebesar Rp 110.302.727.000 (*Seratus Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp95.945.619.000 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp 110.302.727.000 (*Seratus Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).



Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Koreksi Pencatatan Kodefikasi Barang	95.945.619.000

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Koreksi Pencatatan Kodefikasi Barang	95.945.619.000
Koreksi Pencatatan Pengurangan	14.357.108.000

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1,526	Rp 95.945.619.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.500.254.509,00.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1,125 buah dengan nilai sebesar Rp 11,389,999,155 (*Sebelas Milyar Tiga*



Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.114 buah dengan nilai sebesar Rp 9.910.861.435,00 (*Sembilan Milyar Sembila Ratus Sepuluh Juta Delapan ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat ratus Tiga Puluh Lima rupiah*), mutasi tambah sebanyak 11 buah dengan nilai sebesar Rp1.521.210.605,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp42.072.885,00 (*Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp1.713.207.820,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	4	1.713.207.820,00



Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 13 buah dengan nilai sebesar Rp.1.161.607.820,00 (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	9	971,610,820
Rusak Berat	4	239,919,000

Tabel 10. Kondisi Alat Angkutan



c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp.158.000,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur

Rincian data Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	1	158.000

Tabel 13. Kondisi Alat Bengkel dan Alat Ukur

d. Alat Pengolahan (3.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 4.400.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus*



Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Pengolahan

Mutasi Kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Pengolahan

Rincian data Alat Pengolahan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	2	4.400.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 16. Kondisi Alat Pengolahan

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 909 buah dengan nilai sebesar Rp 6.826.470.584,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 900 buah dengan nilai sebesar Rp5.360.032.864,00, mutasi tambah sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar Rp1.508.510,605,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp42.072.885,00.



Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Hibah	1.508.510,605	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Koreksi Pencatatan	42.072.885	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rincian data Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	517	4,655,160,576
Rusak Ringan	313	709,945,286
Rusak Berat	80	1,449,757,708

Tabel 16. Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 39 buah dengan nilai sebesar Rp 184.791.385,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 38 buah dengan nilai sebesar Rp 172.791.385,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 12.000.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.



Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Hibah	12.000.000	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Rincian data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	35	144,114,293
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	2	28,748,000

Tabel 19. Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 1.657.000,00 (*Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 1.657.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan

Rincian data Alat Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 22. Kondisi Alat Kedokteran dan Kesehatan

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 150.000,00 (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 150.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Alat Laboratorium

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



-	-	-
---	---	---

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Alat Laboratorium

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	150.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Alat Laboratorium

i. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Alat Persenjataan

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Alat Persenjataan

Rincian data Alat Persenjataan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	2	1.000.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 28. Kondisi Alat Persenjataan

j. Komputer (3.10)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 150 buah dengan nilai sebesar Rp 1.481.499.546,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 149 buah dengan nilai sebesar Rp 1.480.799.546,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 700.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	700.000	-

Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Komputer

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Komputer

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	73	858,818,911



Rusak Ringan	49	313,133,965
Rusak Berat	28	286,965,090

Tabel 31. Kondisi Komputer

k. Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 32. Rincian Mutasi Tambah Alat Eksplorasi

Mutasi Kurang Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 33. Rincian Mutasi Kurang Alat Eksplorasi

Rincian data Alat Eksplorasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 34. Kondisi Alat Eksplorasi



l. Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 35. Rincian Mutasi Tambah Alat Pengeboran

Mutasi Kurang Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 36. Rincian Mutasi Kurang Alat Pengeboran

Rincian data Alat Pengeboran berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 37. Kondisi Alat Pengeboran

m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai



sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 38. Rincian Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 39. Rincian Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Rincian data Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 40. Kondisi Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



-	-	-
---	---	---

Tabel 41. Rincian Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi

Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 42. Rincian Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi

Rincian data Alat Bantu Eksplorasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 43. Kondisi Alat Bantu Eksplorasi

o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 44. Rincian Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tabel 45. Rincian Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja

Rincian data Alat Keselamatan Kerja berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 46. Kondisi Alat Keselamatan Kerja

p. Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Alat Peraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 47. Rincian Mutasi Tambah Alat Peraga

Mutasi Kurang Alat Peraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 48. Rincian Mutasi Kurang Alat Peraga

Rincian data Alat Peraga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	Rp 1.500.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 49. Kondisi Alat Peraga

q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 10.560.000,00 (*Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 10.560.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 50. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 51. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi

Rincian data Peralatan Proses/Produksi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	1	10.560.000
Rusak Ringan	-	-



Rusak Berat	-	-
-------------	---	---

Tabel 52. Kondisi Alat Peralatan Proses/Produksi

r. Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar 0,00.

Mutasi Tambah Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-

Tabel 53. Rincian Mutasi Tambah Rambu-Rambu

Mutasi Kurang Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
		-

Tabel 54. Rincian Mutasi Kurang Rambu-Rambu

Rincian data Rambu-Rambu berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 55. Kondisi Rambu-Rambu

s. Peralatan Olahraga (3.19)

Saldo Peralatan Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol Rupiah*). Jumlah tersebut



terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Peralatan Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-

Tabel 56. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Olahraga

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
		-

Tabel 57. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Olahraga

Rincian data Peralatan Olahraga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 58. Kondisi Peralatan Olahraga

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.756.628.926,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp 8.726.326.425,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp 30.302.501,00.



Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.500.254.509,00.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 31.673.583.280,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 31,673,583,280,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh rupiah*), mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 31.241.363.280,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp31.241.363.280,00 (*tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 31.673.583.280,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp31.673.583.280,00, mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp31,241,363,280,00 dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp31,241,363,280,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 59. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung



Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 60. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1.526	31,241,363,280
Rusak Ringan	120	326,566,000
Rusak Berat	120	105,654,000

Tabel 61. Kondisi Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp5,791,336,476,00 (*lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp5,791,336,476,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

**Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 62. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 63. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.



5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 116 buah dengan nilai sebesar Rp 12,696,576,00 (*Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 116 buah dengan nilai sebesar Rp 12,696,576,00 (*Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 111 buah dengan nilai sebesar Rp Rp 12,696,576,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 111 buah dengan nilai sebesar Rp 12,696,576,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 64. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 65. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.



b. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 66. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi

Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 67. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi

Dari jumlah aset tetap dalam renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Kelompok barang aset tetap dalam renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan,



Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 68. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 69. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

7. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:



a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 101 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Saldo Software (8.01.01) yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Software di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar 0,00 (nol rupiah).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 362.000,00 (*tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*). Jumlah ini terdiri



dari saldo awal laporan sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 362.000,00 (*tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	-	-
2. Peralatan dan Mesin	362.000	240.000
3. Gedung dan Bangunan	-	-
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	-	-
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	-	-
Jumlah	362.000	240.000

Tabel 70. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31 Desember 2025

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp 0,00 (*nol rupiah*) menjadi Rp 0,00 (*nol rupiah*).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi



kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp 0,00 (*nol rupiah*) menjadi Rp 0,00 (*nol rupiah*).

8. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 124,557,030,659 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	1,370,550	0%	0	0%	1	0%
	Sub Jumlah (1)	1,370,550	0%	0	0%	1	0%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	95,945,619,000	69%	0	0%	95,945,619,000	69%
2	Peralatan dan Mesin	11,357,584,154	8%	32,415,001	99%	11,389,999,155	8%
3	Gedung dan Bangunan	31,673,583,280	23%	0	0%	31,673,583,280	23%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0%	0	0%	0	0%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%



6	KDP	12,696,576	0%	0	0%	12,696,576	0%
Sub Jumlah (2)		138,989,483,010	100%	32,415,001	99%	139,021,898,011	100%
III	Aset Lainnya						
1	Software	135,505,000	0%	-	-	135,505,000	0%
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	83,840,000	0%	-	-	83,840,000	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	362,000	0%	240,000	0%	602,000	0%
Sub Jumlah (3)		219,707,000	0%	240,000	1%	219,947,000	0%
Total		139,210,560,560	100%	32,655,001	100%	139,241,845,012	100%

Tabel 71. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

N o.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (1)		0	0%	0	0%	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0%	0	0%	0	0%
2	Peralatan dan Mesin	8,726,326,425	60%	30,302,501	100%	8,756,628,926	60%
3	Gedung dan Bangunan	5,791,336,476	40%	0	0%	5,791,336,476	40%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0%	0	0%	0	0%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (2)		14,517,662,901	100%	30,302,501	100%	14,547,965,402	100%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	135.505.000	0%	0	0%	0	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	362,000	0%	0	0%	362,000	0%
Sub Jumlah (3)		135,867,000	0%	0	0%	362,000	0%
Total		14,653,529,901	100%	30,302,501	100%	14,683,832,402	100%

Tabel 72. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

**B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan**

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	1.370.550	1.370.550	0
1	Persediaan	1.370.550	1.370.550	0
II	Aset Tetap	124.471.820.109	124.471.820.109	0
1	Tanah	95.945.619.000	95.945.619.000	0
2	Peralatan dan Mesin	11.357.684.154	11.357.684.154	0
3	Gedung dan Bangunan	31.673.583.280	31.673.583.280	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0
5	Aset Tetap Lainnya	12.696.576	12.696.576	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(14.517.662.901)	(14.517.662.901)	0
III	Aset Lainnya	83.840.000	83.840.000	0
1	Aset Tak Berwujud	219.345.000	219.345.000	0
2	Aset Lain-Lain *)	362.000	362.000	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(135.867.000)	(135.867.000)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		249.028.950.768	249.028.950.768	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 73. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA**A. Perkembangan Nilai BMN**

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:



No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	138,798,165,981	-	-
2	Laporan Unaudited 2022	140.060.309.950	1.262.143.969	0,90 %
3	Laporan Unaudited 2023	140.167.309.950	893.421.890	0,63 %
4	Laporan Unaudited 2024	138.791.989.981	1.375.319.969	0,98 %
5	Laporan Unaudited 2025	139.243.215.561	451.225.580	0,32 %

Tabel 74. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per Periode Laporan *Unaudited*

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara Jakarta Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	1	95,945,619,000
2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	13	1,161,607,820
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	960	7,022,285,969
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	150	1,481,499,546
5	Alat Berat	-	-	4	1,713,207,820
6	Bangunan Gedung	-	-	1	31,241,363,280
7	Rumah Negara	-	-	2	432,220,000
8	Jalan dan Jembatan	-	-	0	0
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	0	0
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	0	0
11	Aset Tetap lainnya	-	-	116	12,696,576
12	Aset Tak Berwujud	-	-	2	219,345,000
Jumlah		-	-	1.249	139,229,845,011

Tabel 75. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungs	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	1	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 76. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-



3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 77. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 (Unaudited) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

g. Pengungkapan Penting Lainnya

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:



No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1
2	Bangunan gedung Kantor Permanen	3	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding	1

Tabel 78. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terkait **Aset Tetap** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	Terdapat Pelaksanaan Belanja Modal terhadap Pengadaan Aset berupa Gedung dan Peralatan Mesin	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang pada AC Sentral pengadaan tahun 2024

Tabel 79. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 80. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pengadaan	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Tidak Disetujui
2	Pengadaan	SUV Listrik	Disetujui
3	Pemeliharaan	Elevator /Lift	Disetujui
4	Pemeliharaan	Transportable Generating Set	Disetujui
5	Pemeliharaan	Pompa Air	Disetujui



6	Pemeliharaan	Pompa Air	Disetujui
7	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
8	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
9	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
10	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
11	Pemeliharaan	Sepeda Motor	Disetujui
12	Pemeliharaan	A.C. Sentral	Disetujui
13	Pemeliharaan	A.C. Split	Tidak Disetujui
14	Pemeliharaan	A.C. Split	Tidak Disetujui
15	Pemeliharaan	A.C. Split	Tidak Disetujui
16	Pemeliharaan	A.C. Split	Tidak Disetujui
17	Pemeliharaan	A.C. Split	Tidak Disetujui
18	Pemeliharaan	A.C. Split	Tidak Disetujui
19	Pemeliharaan	A.C. Split	Tidak Disetujui
20	Pemeliharaan	A.C. Split	Tidak Disetujui
21	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
22	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
23	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
24	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
25	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
26	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
27	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
28	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
29	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
30	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
31	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
32	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
33	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
34	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
35	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
36	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
37	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
38	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
39	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
40	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
41	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
42	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
43	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
44	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
45	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
46	Pemeliharaan	A.C. Split	Disetujui
47	Pemeliharaan	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Disetujui
48	Pemeliharaan	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Disetujui
49	Pemeliharaan	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Disetujui
50	Pemeliharaan	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Disetujui
51	Pemeliharaan	Local Area Network (LAN)	Tidak Disetujui
52	Pemeliharaan	Komputer Jaringan Lainnya	Tidak Disetujui
53	Pemeliharaan	Komputer Jaringan Lainnya	Tidak Disetujui
54	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
55	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
56	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
57	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
58	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui



59	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
60	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
61	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
62	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
63	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
64	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
65	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
66	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
67	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
68	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
69	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
70	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
71	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
72	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
73	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
74	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
75	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
76	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
77	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
78	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
79	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
80	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
81	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
82	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
83	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
84	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
85	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
86	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
87	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
88	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
89	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
90	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
91	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
92	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
93	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
94	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
95	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
96	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
97	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
98	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
99	Pemeliharaan	P.C Unit	Tidak Disetujui
100	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
101	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
102	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
103	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
104	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
105	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
106	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
107	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
108	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
109	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
110	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
111	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui



112	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
113	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
114	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
115	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
116	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
117	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
118	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
119	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
120	Pemeliharaan	P.C Unit	Disetujui
121	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
122	Pemeliharaan	Lap Top	Tidak Disetujui
123	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
124	Pemeliharaan	Lap Top	Tidak Disetujui
125	Pemeliharaan	Lap Top	Tidak Disetujui
126	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
127	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
128	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
129	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
130	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
131	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
132	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
133	Pemeliharaan	Lap Top	Tidak Disetujui
134	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
135	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
136	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
137	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
138	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
139	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
140	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
141	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
142	Pemeliharaan	Lap Top	Tidak Disetujui
143	Pemeliharaan	Lap Top	Tidak Disetujui
144	Pemeliharaan	Lap Top	Tidak Disetujui
145	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
146	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
147	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
148	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
149	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
150	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
151	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
152	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
153	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
154	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
155	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
156	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
157	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
158	Pemeliharaan	Lap Top	Disetujui
159	Pemeliharaan	Note Book	Tidak Disetujui
160	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
161	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
162	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
163	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
164	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui



165	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
166	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Tidak Disetujui
167	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
168	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
169	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
170	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
171	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
172	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
173	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Tidak Disetujui
174	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
175	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
176	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
177	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
178	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
179	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
180	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
181	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
182	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
183	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
184	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
185	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
186	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
187	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
188	Pemeliharaan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
189	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
190	Pemeliharaan	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Disetujui
191	Pemeliharaan	Server	Disetujui
192	Pemeliharaan	Rak Server	Disetujui
193	Pemeliharaan	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding	Disetujui
194	Pemeliharaan	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Disetujui

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 194 usulan dan tidak disetujui sebanyak 32 usulan

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1	Penghapusan	4	Tidak Disetujui
2	Penghapusan	5	Disetujui

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp 700.000,00. Namun, masih terdapat BMN



yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	-	-	1	95,945,619,000	1	95,945,619,000
Alat Angkutan Bermotor	-	-	13	1,161,607,820	13	1,161,607,820
Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	960	7,022,285,969	960	7,022,285,969
Peralatan dan Mesin TIK	-	-	150	1,481,499,546	150	1,481,499,546
Alat Berat	-	-	4	1,713,207,820	4	1,713,207,820
Bangunan Gedung	-	-	1	31,241,363,280	1	31,241,363,280
Rumah Negara	-	-	2	432,220,000	2	432,220,000
Jalan dan Jembatan	-	-	0	0	0	0
Instalasi dan Jaringan	-	-	0	0	0	0
Bangunan Air dan Irigasi	-	-	0	0	0	0
Aset Tetap lainnya	-	-	116	12,696,576	116	12,696,576
Aset Tak Berwujud	-	-	2	219,345,000	2	219,345,000
Total	-	-	1.249	139,229,845,011	1.249	139,229,845,011

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.

1. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2025 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25082909050021015	Penjualan	Rp 3.556.500
2	PPL25070914231761751	Pemusnahan	Rp 108.015.000

2. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rp 35.000.000, dengan rincian sebagai berikut



No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25112514231314087	S-50/MK/KNL.0701/2026	Peralatan dan Mesin	Rp 10.000.000
2	PPL25082909050021015	S-547/MK/KNL.0701/2025	Peralatan dan Mesin	Rp 25.000.000

3. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp 112.271.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25110715520342101	PSP	Rp 700.000
2	PPL25101308274337047	Penjualan	Rp 3.556.500
3	PPL25070914231761751	Pemusnahan	Rp 108.015.000

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH DKI JAKARTA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH DKI JAKARTA
005010100526704000KD - PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
162151 - SOFTWARE
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025

No	Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Penjelasan
1	DKI. Jakarta	005010100526704000KD	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	135,505,000.00	Aplikasi Persuratan TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) masih di gunakan dalam operasional

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH DKI JAKARTA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH DKI JAKARTA
005010100526704000KD - PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
162191 - ASET TAK BERWUJUD LAINNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025

No	Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Penjelasan
1	DKI. Jakarta	005010100526704000KD	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	83,840,000.00	Website PTTUN Jakarta pttun- jakarta.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH DKI JAKARTA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH DKI JAKARTA
005010100526704000KD - PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025

No	Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Dokumen Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai	No Sp2d	Penjelasan
1	DKI. Jakarta	00501010 05267040 00KD	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	00248/UP_TUP/ 526704/2025	06-05-2025	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Dibayarkan pembuatan spanduk pengambilan sumpah Jabatan PNS An. Global	10103010 14	1	800,000.00	800,000.00	25175130 1009746	Terdapat kesalahan pencatatan pembelian spanduk yang seharusnya tidak didetailkan sebagai aset maupun persediaan, satuan kerja telah melakukan habis pakai atas persediaan berupa spanduk.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 526704

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DKI JAKARTA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/02/26 10:05 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1		3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	186,247	0	186,247	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,072,885	0	42,072,885	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	42,259,132	0	42,259,132	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	42,259,132	0	42,259,132	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	42,259,132	0	42,259,132	

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2025 (Unaudited)

No	Kode Saliter	Nama Saliter	Kode Barang	Nomor KDP	Saldo Awal KDP	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP (Rp)	% Penyelesaian	Sumber Data (Rp Mumi/Pi/jaman)	Uang Muka	Retensi	Keterangan *)			Catatan
															Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
NIHIL																		
Total KDP										0								

Lampiran Laporan Tahunan BMN Berupa Rumah Negara Tahun 2025 Wilayah Jakarta.

No	1. Data User Kerja					2. Data Berupa Rumah Negara					3. Data Riwayat Tanah					4. Status Penggunaan Rumah Negara	5. Status Penghuni Rumah Negara					6. Detail Lokasi Rumah Negara					7. Koordinat Cipta (GPS)		8. Keterangan	9. Keterangan (bila ada, jika terdapat perubahan data, edit pada kolom ring bukannya kolom nomor 3, 5, 7 dan 21)
	Kode BA	Nama Kementerian / Lembaga	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Nama UAKPB	Kode UAKPB	Kode Biring	NUP	Nama Biring	Kondisi	Pemilik Tanah	Kode Biring	ALUP	Nama Biring	Sertifikasi		Nomor Dokumen Sertifikasi Tanah	Sighep yang Menghuni	Besaran Sisa Penghuni (SP)	Nama dan Nomor Jalan	RTRW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Provinsi	Latitude	Longitude			
1	5	MakLanah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	267040	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	4010001004	1	Rumah Negara 1 Gedung II Tipe B Perumahan	Rusak Berat	Diproses/dilum	4010001004		Rumah Negara 1 Gedung II Tipe B Perumahan	SPP	SPP No. 2375 atas nama Pemohonan Pengaduan Indonesia es Mahkamah Agung S.I (minta gugat dengan banding)	Digunakan sendiri untuk operasional	tidak di huni		Jl. Flamboyan IV No. 40, Sektor Pawa, kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara,	018/08	Sunter	Tanjung Priuk	KOTA JAKARTA UTARA	DKI JAWARTA	-61333774	106.873.073	Sertifikat masih dalam proses dengan Banding	Data Tidak Sesuai	
2	5	MakLanah Agung RI	1	Badan Urusan Administrasi	267040	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	4010001004	2	Rumah Negara 2 Gedung II Tipe B Perumahan	Rusak Ringan	Diproses/dilum	4010001004		Rumah Negara 2 Gedung II Tipe B Perumahan	SPP	SPP No. 2375 atas nama Pemohonan Pengaduan Indonesia es Mahkamah Agung S.I (minta gugat dengan banding)	Digunakan sendiri untuk operasional	tidak di huni		Jl. Flamboyan IV No. 40, Sektor Pawa, kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara,	018/08	Sunter	Tanjung Priuk	KOTA JAKARTA UTARA	DKI JAWARTA	-61333774	106.873.073	Sertifikat masih dalam proses dengan Banding	Data Tidak Sesuai	

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (526704) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 10:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,360,550	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,000	0
0.0	131111	Tanah	95,945,619,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,357,584,154	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	31,673,583,280	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	12,696,576	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,726,326,425
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,791,336,476
0.0	162151	Software	135,505,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	83,840,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	362,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	362,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	135,505,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,810,326,153
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	30,863,378
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,390,077,151
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	42,259,132	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	480,000
0.0	391111	Ekuitas	0	138,742,710,357
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14,352,900,711	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	12,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	186,247
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,431,516,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	37,334	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	243,860,852	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	55,330,554	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	93,330,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	261,260,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	43,246,029	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	134,483,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	456,062,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	23,169,996	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,501,601,955	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	6,325,368,725	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	245,024,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,952	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,523,200	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,376,896	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (526704) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 10:29 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,462,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	16,222,080	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	59,583,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	10,820,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,040,932,792	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,944,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	74,400,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,973,090	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	30,683,558	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,044,298	0
3.0	522141	Beban Sewa	566,971,200	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	512,411,140	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	23,976,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	383,438,226	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	17,974,550	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	671,240,218	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	681,333,705	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	64,262,989	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21,781,945	0
JUMLAH			170,640,173,187	170,640,173,187

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

Drs. MUHIDIN, MH
NIP 196611251996031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (526704) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA Tgl Data : 23/02/26 2:43 AM

Tgl Cetak : 23/02/26 10:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	1,370,550	816,862	553,688	67.78
JUMLAH ASET LANCAR	1,370,550	816,862	553,688	67.78
ASET TETAP				
Tanah	95,945,619,000	110,302,727,000	(14,357,108,000)	(13.02)
Peralatan dan Mesin	11,357,584,154	9,879,146,434	1,478,437,720	14.97
Gedung dan Bangunan	31,673,583,280	31,673,583,280	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	12,696,576	12,696,576	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,517,662,901)	(13,160,820,171)	(1,356,842,730)	10.31
JUMLAH ASET TETAP	124,471,820,109	138,707,333,119	(14,235,513,010)	(10.26)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	219,345,000	219,345,000	0	0.00
Aset Lain-lain	362,000	108,377,000	(108,015,000)	(99.67)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(135,867,000)	(243,882,000)	108,015,000	(44.29)
JUMLAH ASET LAINNYA	83,840,000	83,840,000	0	0.00
JUMLAH ASET	124,557,030,659	138,791,989,981	(14,234,959,322)	(10.26)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,841,189,531	49,279,624	1,791,909,907	3,636.21
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,841,189,531	49,279,624	1,791,909,907	3,636.21
JUMLAH KEWAJIBAN	1,841,189,531	49,279,624	1,791,909,907	3,636.21
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	122,715,841,128	138,742,710,357	(16,026,869,229)	(11.55)
JUMLAH EKUITAS	122,715,841,128	138,742,710,357	(16,026,869,229)	(11.55)
JUMLAH EKUITAS	122,715,841,128	138,742,710,357	(16,026,869,229)	(11.55)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	124,557,030,659	138,791,989,981	(14,234,959,322)	(10.26)

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 23 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

Drs. MUHIDIN, MH

NIP 196611251996031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA

MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 13

satker : 526704

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	00505	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	132111	Peralatan dan Mesin	8,956,096	00501	526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	8,956,096	0
2	00505	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-8,476,096	00501	526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	-8,476,096	0

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Unaudited)

[illegible]



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

**BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Nomor : 413/SEKPTTUN/W2-TUN/PL.1.2/II/2026

Nama Satker : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Kode Satker : 526705
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara
UAPB : Mahkamah Agung RI

Pada hari ini Rabu, Tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Wahyu Suprptono, S.Ip
NIP : 19760809 200604 1 001
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan
2. Nama : Akhmad Ibnu Romdon, S.E
NIP : 19790818 200604 1 002
Jabatan : Ka. Sub. Bag TU/RT
3. Nama : Iis Yulita Trisnawati, S.E
NIP : 19780727 200604 2 001
Jabatan : Ka. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan
4. Nama : Wisnu Purnama Indra, S.E
NIP : 19830113 202521 1 028
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Unaudited Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Unaudited Tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Wahyu Suprptono, S.Ip

.....

2. Akhmad Ibnu Romdon, S.E

.....

3. Iis Yulita Trisnawati, S.E

.....

4. Wisnu Purnama Indra, S.E

.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Drs. Muhidin, M.H, SH
NIP. 19661125 199603 1 001

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Kode Satker : 526705
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara
UAPB : Mahkamah Agung RI

a.	Barang Konsumsi	:	Rp 0,-
b.	Amunisi	:	
c.	Bahan Untuk Pemeliharaan	:	Rp. 0,-
d.	Suku Cadang	:	
e.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis	:	
f.	Pita Cukai , Materai dan Leges	:	Rp. 0,-
g.	Bahan Baku	:	
h.	Barang Dalam Proses/Setengah Jadi	:	
i.	Tanah/Bangunan untuk dijual	:	
j.	Hewan/Tanaman untuk dijual	:	
k.	Total	:	Rp. 0,-

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Wahyu Suprptono, S.Ip
2. Akhmad Ibnu Romdon, S.E
3. Iis Yulita Trisnawati, S.E
4. Wisnu Purnama Indra,S.E

.....
.....
.....
.....

Penjelasan atas selisih

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta


Drs. Muhidin, M.H, SH
NIP. 19661125 199603 1 001





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

**BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Nomor : 412/SEKPTTUN/W2-TUN/PL.1.2/II/2026

Nama Satker : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Kode Satker : 526704
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
UAPB : Mahkamah Agung RI

Pada hari ini Rabu, Tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Wahyu Suprptono, S.Ip
NIP : 19760809 200604 1 001
Jabatan : Kabag Umum dan Keuangan
2. Nama : Akhmad Ibnu Romdon, S.E
NIP : 19790818 200604 1 002
Jabatan : Ka. Sub. Bag TU/RT
3. Nama : Iis Yulita Trisnawati, S.E
NIP : 19780727 200604 2 001
Jabatan : Ka. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan
4. Nama : Wisnu Purnama Indra, S.E
NIP : 19830113 202521 1 028
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan opmane fisik persediaan Unaudited Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Unaudited Tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Kode Satker : 526704
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
UAPB : Mahkamah Agung RI

a.	Barang Konsumsi	:	Rp. 1.360.550,-
b.	Amunisi	:	
c.	Bahan Untuk Pemeliharaan	:	Rp. 10.000,-
d.	Suku Cadang	:	
e.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis	:	
f.	Pita Cukai , Materai dan Leges	:	Rp. 0,-
g.	Bahan Baku	:	
h.	Barang Dalam Proses/Setengah Jadi	:	
i.	Tanah/Bangunan untuk dijual	:	
j.	Hewan/Tanaman untuk dijual	:	
k.	Total	:	Rp. 1.370.550,-

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Wahyu Supraptono, S.I.p
2. Akhmad Ibnu Romdon, S.E
3. Iis Yulita Trisnawati, S.E
4. Wisnu Purnama Indra, S.E

.....
.....
.....
.....

Penjelasan atas selisih

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

.....
Drs. Muhidin, M.H, SH
NIP. 19661125 199603 1 001

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Wahyu Suprpto, S.Ip

.....

2. Akhmad Ibnu Romdon, S.E

.....

3. Iis Yulita Trisnawati, S.E

.....

4. Wisnu Purnama Indra, S.E

.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

.....

Drs. Muhidin, M.H, SH
NIP. 19661125 199603 1 001